

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Mayoritas negara berkembang mengalami kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial ekonomi yang terus menerus terjadi. Pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi di negara berkembang namun belum membuahkan hasil yang memuaskan, hingga saat ini pada tahun 2023 tercatat 25,90 juta orang di Indonesia masih dikategorikan rakyat miskin (Pratama, 2014).

Kemiskinan terjadi jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pakaian, pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok individu tidak dapat mencapai standar kesejahteraan finansial yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sianturi et al, 2021). Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang disebabkan dari berbagai faktor seperti pengangguran, rendahnya pendapatan dan lain-lain. Kemiskinan juga bukan hanya sekedar kekurangan uang dan taraf pendapatan rendah saja, kemiskinan juga berdampak negatif seperti mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hukum, tingkat kesehatan, pendidikan rendah, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan, dan memilih jalan hidupnya sendiri (Rahman, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) menjelaskan bahwa presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-16 terendah nasional tetapi jumlah penduduk miskin masih berada di urutan ketiga secara nasional. Kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Cirebon, menurut Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa kabupaten Cirebon berada pada urutan ke 4 tertinggi di Jawa Barat dengan presentase kemiskinannya sebesar 12,01 %. Kemiskinan tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, serta penurunan sumber daya. Hal tersebut berdampak pada

terjadinya pemerosotan perekonomian, Dengan turunnya perekonomian tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, serta penurunan daya beli masyarakat sehingga berakibat pada peningkatan jumlah penduduk miskin, seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
1.	2013	307,20
2.	2014	300,50
3.	2015	313,21
4.	2016	288,49
5.	2017	279,60
6.	2018	232,40
7.	2019	217,64
8.	2020	247,94
9.	2021	271,02
10	2022	266,10

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu besar, tetapi pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan kemiskinan sebesar 313,21, kemudian terus mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai pada tahun 2019 sebesar 217,64. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 247,94, pandemi covid-19 menjadi salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan naiknya jumlah kemiskinan di Kabupaten Cirebon sampai tahun 2021 sebesar 271,02. Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa jumlah atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak stabil tiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuasi dalam perekonomian yang mengakibatkan ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan, krisis finansial, perubahan dalam kebijakan pemerintah. Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan

memiliki pendapatan, kemudian menyebabkan penurunan daya beli sehingga masuk ke dalam lingkaran kemiskinan (Jhingan, 2016).

Dalam mengambil kebijakan untuk menekan angka kemiskinan, tentu perlu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan, agar kebijakan yang diambil dapat menyelesaikan masalah secara tepat, terkhusus pada Kabupaten Cirebon. Hubungan pengangguran dan kemiskinan erat kaitannya, ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan yang tetap, maka akan cenderung kesulitan untuk mencukupi kebutuhan dasar, hal ini dapat mengakibatkan jumlah kemiskinan yang lebih besar. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan adanya penyerapan tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran pun bertambah seiring penambahan angkatan kerja (Muhammad Farhan Dakhilullah, 2022).

Pengangguran merupakan orang yang sama sekali tidak berkerja atau sedang mencari pekerjaan, dan pengangguran terbuka terjadi karena kurangnya keterampilan atau pendidikan yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon seperti yang dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel 1.2 Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2022 (dalam persen)**

No	Tahun	Tingkat Pengangguran (%)
1.	2013	14,88
2.	2014	13,32
3.	2015	10,50
4.	2016	8,89
5.	2017	9,61
6.	2018	10,64
7.	2019	10,35
8.	2020	11,52
9.	2021	10,38
10.	2022	8,11

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022*

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2013-2022 di Kabupaten Cirebon tertinggi pada tahun 2013 dengan presentase 14,88, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan presentase 8,89 dan kembali mengalami kenaikan di tahun berikutnya sebesar 9,61, dan jumlah pengangguran terbuka terendah pada tahun 2022 dengan presentase 8,11 %. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran di Kabupaten Cirebon tidak stabil dan perlu mengambil langkah-langkah untuk menurunkan tingkat pengangguran, penyebab pengangguran diantaranya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar, jika tidak memiliki klasifikasi yang baik maka sebagian dari mereka tidak bisa di serap oleh perusahaan sehingga menimbulkan pengangguran. Pengangguran terdiri dari orang yang sedang mencari kerja dan angkatan kerja, dengan angkatan kerja yang melipah yang merupakan salah satu mesin bagi pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja bagi proses produksi (Zuhroh, 2016).

Kemudian, dengan melalui produktifitas mereka akan mendapatkan penghasilan, penghasilan didapatkan dari upah saat berkerja, dan upah tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap para buruh. Mengingat dibawah tahun 1970-an para buruh diberikan upah yang sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada dibawah standar. Adanya kejadian seperti ini sebuah organisasi perdagangan Amerika Serikat dan beberapa aktivis hak asasi manusia mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di daerah Indonesia. Kebijakan upah minimum di Indonesia sendiri pertama kali diterapkan pada awal tahun 1970an. Namun pelaksanaannya tidak efektif pada tahun-tahun tersebut. Pemerintah Indonesia baru mulai memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan kebijakan upah minimum pada akhir tahun 1980an. (Sumarsono, 2003).

Pemberian upah merupakan salah satu langkah penting dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja. Dari tahun ke tahun upah minimum kabupaten (UMK) di berbagai wilayah selalu menunjukkan peningkatan, Peningkatan nilai UMK disebabkan oleh nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) karena dengan pertimbangan bahwa kesejahteraan pekerja harus tetap

terjamin. (Merdekawaty, 2016) Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Data upah minimum Kabupaten Cirebon dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel 1.3 Upah Minimum Kabupaten Cirebon Tahun 2013-2022**

No	Tahun	Upah Minimum Kabupaten Cirebon (Rupiah)
1.	2013	1.081.000
2.	2014	1.212.750
3.	2015	1.400.000
4.	2016	1.592.220
5.	2017	1.723.578
6.	2018	1.873.701
7.	2019	2.024.160
8.	2020	2.196.416
9.	2021	2.269.556
10	2022	2.279.982

*Dinaskertrans provinsi jawa barat 2022*

Tabel 1.3 menunjukkan Upah Minimum Kabupaten pada tahun 2013 sebesar Rp 1.081.000 dan pada tahun 2014 sampai 2021 terus mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2022 kenaikan upah minimum hanya Rp 10.426 dan kenaikan tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 187.250. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum kabupaten tidak stabil setiap tahunnya, Meningkatnya UMK tidak serta merta dapat menurunkan angka kemiskinan, hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sehingga pemerintah dirasa perlu untuk meningkatkan dan menjamin kesejahteraan para pekerja di daerahnya (Merdekawaty et al, 2016).

Faktor selanjutnya dari penyebab kemiskinan adalah dengan dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat terobosan untuk menilai pertumbuhan manusia, Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Kemudian, pendapatan yang rendah inilah yang dapat meningkatkan jumlah

kemiskinan. Empat komponen pembentuk IPM adalah mengukur nilai harapan hidup, tingkat melek huruf, efektivitas pelayanan kesehatan, dan rata-rata usia sekolah yang dikaitkan dengan keberhasilan (BPS, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap dampak tingginya jumlah individu miskin. Data indeks pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon dijelaskan pada tabel berikut

**Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon**

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	2013	65,06
2.	2014	65,53
3.	2015	66,07
4.	2016	66,70
5.	2017	67,39
6.	2018	68,05
7.	2019	68,69
8.	2020	68,75
9.	2021	69,12
10	2022	70,06

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2022*

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa IPM terendah ada pada tahun 2013 sebesar 65,06 dan mengenai kenaikan terus menerus sampai pada tahun 2022 sebesar 70,06. Klasifikasi indeks pembangunan manusia menurut BPS (2014) dikatakan rendah jika IPM kurang dari 60, dan bagus sedang ketika 60 sampai 69, kemudian dikatakan tinggi jika tingkat IPM 70 sampai 79, dan dikatakan tinggi jika lebih dari 80. Dari data tersebut menunjukkan IPM Kabupaten Cirebon rata-rata tergolong sedang, dan tergolong tinggi hanya pada tahun 2022 sebesar 70,06. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam indikator indikator peting dari komponen IPM untuk terus meningkatkan tingkat IPM.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan indikator untuk mengukur kemiskinan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tiara Novita Dewi, 2024) dengan judul, dengan hasil bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan variabel upah minimum, PDRB, dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh dan (Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana, 2022) menyatakan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pengangguran, upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia. Namun, hasil sebaliknya ditemukan pada penelitian (Gebila et al, 2020) menyatakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian, upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Qintharah dan Chairunnisa, 2020). Serta, indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Nurul Pratiwi et al, 2022).

Menurut pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 pengangguran mengalami penurunan yang signifikan dari angka 8,11 persen hal ini terjadi berkat program terkait ketenagakerjaan yang diterapkan. Walaupun pengangguran telah berkurang Pemkab Cirebon masih memiliki sejumlah tantangan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang sesuai.

Penulis merasa tertarik mengambil penelitian tentang pengangguran, upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan, karena variabel yang diteliti berdasarkan kajian utama yang telah dipelajari pada ekonomi makro, dan kemiskinan adalah masalah sosial yang jika berkelanjutan bisa berdampak terhadap individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan, serta juga bisa menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan peneliitian terkait variabel pengangguran, upah minimum kabupaten (UMK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta pengaruhnya terhadap kemiskinan dengan pembaruan dari penelitian sebelumnya dan menggunakan data dari tahun 2013-2022. Maka. Maka, judul yang penulis teliti yaitu **“Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon”**

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tertinggi ke 4 di Jawa Barat

2. Tingkat pengangguran terbuka tidak stabil setiap tahunnya
3. Indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan tapi jumlah penduduk miskin masih tetap tinggi
4. Upah minimum kabupaten terus mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2022 kenaikan UMK hanya sekitar 10.000 rupiah

### **C. BATASAN MASALAH**

Tujuan dari batasan masalah adalah agar penelitian lebih fokus dan tidak meyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Pengaruh Pengangguran Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan Di Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan Di Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten (UMK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara bersamaan berpengaruh terhadap kemiskinan Di Kabupaten Cirebon?

### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

2. Untuk menganalisis apa bagaimana upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis apa bagaimana upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten Cirebon.
4. Untuk menganalisis bagaimana tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten (UMK), dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara bersamaan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi akademisi, memberikan sumbangsih pengetahuan dan penilaian terhadap Pengaruh Pengangguran dan UMK (Upah Minimal Kabupaten) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon Periode 2013 – 2022 dan juga dapat menambah literatur di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya pada Jurusan Ekonomi Syariah.
- b) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan maupun pengalaman terkait pengangguran, upah minimum kabupaten (UMK) dan indeks pembangunan manusia (IPM) serta kemiskinan sebagai pengaplikasian teori-teori yang didapatkan di jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab. Peneliti menggunakan sistematika penulisan dalam penelitian ini supaya tidak melenceng dari pokok pembahasan dan supaya tersusun secara sistematis. Berikut sistematika dalam penelitian ini yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi kajian teori, yang meliputi penjelasan variabel penelitian, penelitian sebelumnya yang mendukung pelaksanaan penelitian supaya menjadi lebih baik, kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menggambarkan tentang objek penelitian yaitu kemiskinan, pengangguran, upah minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia di kabupaten Cirebon

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang di dalamnya menjelaskan kesimpulan, saran atau usulan terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

